

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
AMBULANCE DENGAN PENGELOLA DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kota
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh :

**DEWI MAYA SARI
NPM : 1721030162**



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
AMBULANCE DENGAN PENGELOLA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Syariah (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh

**DEWI MAYA SARI
NPM : 1721030162**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Salah satu contoh dalam usaha kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya. Seperti halnya kecurangan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pengelola mobil *ambulance* di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, antara keduanya didasari akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yakni sebesar 50% antara pemilik dan pengelola. Kecurangan yang dilakukan oleh pengelola sering menambahkan harga tarif yang setiap mobil. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum Islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum Islam dan secara umum di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif analisis komparatif ialah pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola

di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menggunakan akad *Mudharabah* dengan ketentuan tarif setiap mobil ambulance miliknya yakni Rp 100.000,- menggunakan sistem panggilan via telepon atau WA (*Whatsapp*) bagi konsumen yang membutuhkan mobil *ambulance*, dan sedangkan ditinjau dalam hukum Islam praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau tidak sah dalam hukum Islam, dikarenakan belum memenuhi syarat akad *Mudharabah* dalam Islam. Tidak terpenuhinya pada syarat ke empat akad *Mudharabah* yakni keuntungan. Karena, dalam praktiknya terdapat kecurangan dan ketidak jujuran dalam *presentase* keuntungan yang didapat, hal itu dilarang dalam Islam.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Maya Sari
NPM : 1721030162
Jurusan : Hukum Ekonomu Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam**” (Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Juli 2021

Penulis,



Dewi Maya Sari
NPM.1721030162



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan
Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam
Nama : Dewi Maya Sari
NPM : 1721030162
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003

Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.

NIP. 1985051020201210007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Ambulance Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kota Bandar Lampung) disusun oleh **Dewi Maya Sari Npm 1721030162** Program Studi **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 09 September 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

(.....)

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Penguji III : Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا. (النساء: ٢٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S An-Nisa :29)*



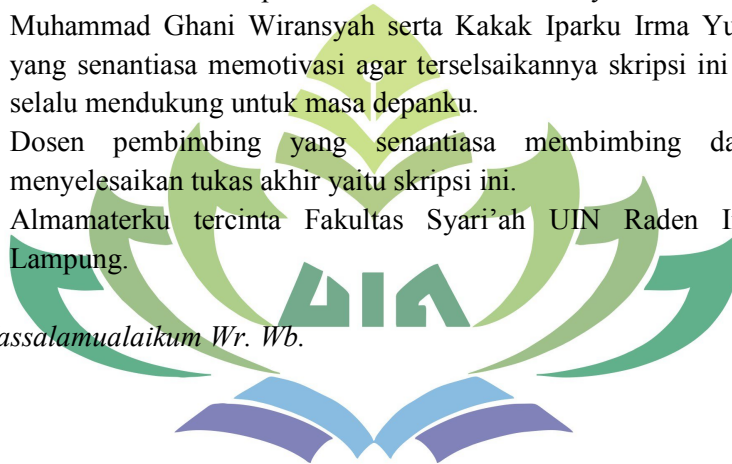
PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tuaku yaitu Ayah Herman Yurni dan Mama Sri Wijayati, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak Hermawan Saputra dan Adik-adikku Rully Hernando dan Muhammad Ghani Wiransyah serta Kakak Iparku Irma Yunita yang senantiasa memotivasi agar terselsaikkannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

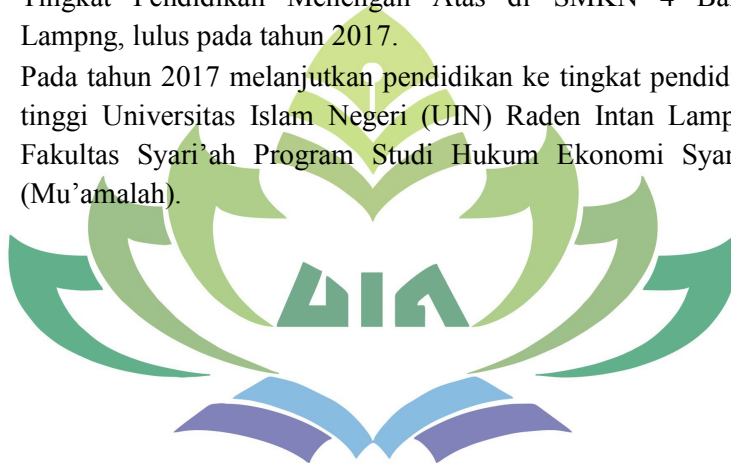
Wassalamualaikum Wr. Wb.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dewi Maya Sari, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 Juli 1999 merupakan anak ke-2 dari pasangan suami isteri Bapak Herman Yurni dan Ibu Sri Wijayati dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK Sriwijaya di Sukarame Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 6 penengahan Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 10 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMKN 4 Bandar Lampng, lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK *AMBULANCE* DENGAN PENGELOLA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Terselsaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, selaku pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selsainya penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku, Kakak adikku, serta pacarku terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselsaikannya skripsi ini.
7. Calon suami Yoga Irawan, S.H yang selalu menemani dan memberi dukungan, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kawan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan.
9. Sahabat-sahabatku Annisa Liya Mutaqqin S.H, Maulidin Amin S.H, Fahmi Wais Al-qurni S.H yang selalu mengulurkan tangan dalam membantu penulisan skripsi, dan selalu memberi support satu sama lain.
10. Untuk kawan berbagi sedih dan tawa, Fitriana Nurmila S S.H, Pevi Heru Yucki S.H, Agung Pratama S.H
11. Kepada Seluruh Masyarakat Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton yang telah bersedia diwawancara untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuan semua pihak Allah Swt berkenan memberikan balasan atas kebaikan mereka
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 02 juli 2021
Penulis

Dewi Maya Sari
NPM.1721030162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II KAJIAN TEORI	 15
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	15
B. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	23
C. Jenis dan Konsep <i>Mudharabah</i>	33
D. Hikmah dan Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	37
E. Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	44
F. Peraturan Prinsip <i>Mudharabah</i> Menurut Prespektif Hukum Islam	45

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	49
2. Keadaan Geografis Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar LampungStruktur Kelurahan	51
3. Struktur Kelurahan	52
B. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik <i>Ambulance</i> Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	61
A. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik <i>Ambulance</i> Dengan Pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	61
B. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik <i>Ambulance</i> Dengan Pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Dalam Tinjauan Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi kelurahan	52
Tabel 3.2 Struktur pengelolaan	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang berjudul: “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung), adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil.¹
2. *Ambulance* adalah kendaraan yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan.²
3. Pengelola adalah orang yang mengelola. Pengelola berasal dari kata dasar kelola. Pengelola berasal dari kata dasar kelola. Pengelola memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengelola dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³
4. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan Hadist.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul tersebut adalah bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *Ambulance* dengan pengelola dalam

¹ Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil”(On-Line), Tersedia di:

<https://www.kajianpustaka.com> (12 desember 2020)

²CV. Widya Karya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Balai Pustaka, 2005), 10

³*Ibid.*, 567

⁴Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 360

tinjauan hukum Islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Latar belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan baik kepentingan hidup masing-masing maupun untuk kemaslahatan umum, misalnya melakukan kerjasama antar beberapa pihak, dengan demikian antar manusia bisa saling mempererat tali silaturahmi, kehidupan bisa menjadi teratur, dan bermasyarakat dengan baik.

Salah satu contoh dalam usaha kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum ini) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.⁵ Ruang lingkup mu'amalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at)

⁵Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *syirkah* (perkongasian), *wadi'ah* (titipan), dan sebagainya.

Hal ini berbeda dengan prinsip *fiqh* mu'amalah yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya, keabsahan *Mudharabah* adalah firman Allah SWT.⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النِّسَاء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu” (Q.S An-nisa ayat 29)

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁷ (روا ابن ماجه وسنن ابن ماجه) ٨

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 887

⁷Erwandi Tarmizi, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2016), Nomor Hadits: 2271

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.⁸

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi *ambulance* pribadi secara keseluruhan. Adapun bagi hasil menurut Islam, adalah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, *ambulance* pribadi akan berfungsi sebagai membantu masyarakat sekitar jika memerlukan bantuan *ambulance* dalam kota maupun luar kota. Supir *ambulance* akan bertindak sebagai (*mudharib*) pengelola, sedangkan pemilik *ambulance* bertindak sebagai (*shahibul maal*) atau pemilik modal.

Didasarkan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di mana Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik *ambulance* atau pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembagian hasil hanya dilakukan pada saat *ambulance* tersebut jalan, dalam arti lain jalan adalah ada yang memakai *ambulance* tersebut untuk keperluan seperti menghantarkan kerumah sakit, kerumah duka diluar maupun diluar kota dan lain-lain.⁹

⁸Erwandi Tarmizi, Kitab Sunan Ibnu Majah, juz 2, Nomor Hadits: 2271

⁹*Ibid*

Praktik *ambulance* dilapangan yaitu mencari dan menunggu panggilan yang memerlukan *ambulance* karna ambulance pribadi tersebut sudah dikenal dilapangan sekitar dan jika karabat atau tetangga memerlukan pertolongan *ambulance* tersebut bisa langsung menghubungi pengelola ambulance, yang dimana nomor pengelola atau pemilik *ambulance* tersebut buat tercatat dimana-mana.

Oleh sebab itu perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, dalam penelitian dengan judul “Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum Islam studi di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum islam.

Sebagai objek pertama untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung di Tinjau dari Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum Islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tentang praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun signifikansi penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berharap mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola dalam tinjauan hukum islam, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah).

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul proposal ini yaitu:

1. Penelitian karya Ratih Aprilia Dewi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi*. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis).¹⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Aprilia Dewi bersifat Deskriptif Analisis dengan pengumpulan data dan interview penulis menanyakan langsung di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara. Adapun persamaan dari penelitian Ratih Aprilia Dewi dengan penelitian penulisan ini yaitu tentang praktik bagi hasil *ambulance* pribadi dan bersifat Deskriptif Analisis dengan pengumpulan data dan interview langsung di kelurahan penengahan kecamatan Kedaton kota bandar lampung. Dan unsur perbedaanya adalah penelitian Ratih Aprilia Dewi meneliti tentang petani kopi dan penelitian ini meneliti tentang *ambulance* pribadi.
2. Penelitian karya Ikha Tasfiriya Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Ponco Sari Kecamatan Serandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa praktik kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya hukum dan syarat yaitu termasuk dakam kategori akad *Mudharabah*.¹¹ Persamaan dalam penelitian

¹⁰ Ratih Afrilia Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengarap Kebun Pada Petani Kopi, Lampung Utara," *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung (2017).

¹¹ Ikha Tasfira, "Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari

ini adalah sama-sama menggunakan akad *Mudharabah*, dan perbedaannya penelitian Ikha Tasfiriya tentang Praktik Bagi Hasil Gadog Sapi sedangkan penelitian ini tentang Praktik Bagi Hasil *Ambulance*.

3. Penelitian karya Maya Yusenta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil 5 poin dalam Pengelolaan Tambak Udang Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa Praktik bagi hasil jenis kerjasama *mudharabah muqayyaddah*, yaitu suatu akad dimana pemilik modal memberi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan ke pengelola. Praktik bagi hasil semestinya dilakukan sesuai rukun dan syarat sah *mudharabah* yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.¹² Persamaan dengan penelitian penulisan ini yaitu apabila mengalami keuntungan maka dibagi sesuai proporsional dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola. Dan perbedaannya adalah peneliti Maya Yusenta pemilik modal memberi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan pengelolaan, sedangkan penelitian ini pemilik *ambulance* tidak memberikan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan pengelolaan.
4. Jurnal karya Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan Universitas PGRI Madiun, dengan judul Penerapan Bagi Hasil Menabung di Bank Muamalat KC Madiun. Jurnal ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah tentang penerapan prinsip bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa

Hukum Islam, "Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta(2007)

¹²Maya yusenta, "Tinjauan hukum islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang, tulang bawang, "skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan lampung(2019).

terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.¹³ Perbedaan penelitian Novita Erliana Sari, dkk dengan penulis ialah membahas mengenai sistematika bagi hasil. Sedangkan persamaan penelitian ialah berfokus pada sistem *mudharabah*. Dan perbedaannya adalah jurnal ini meneliti tentang Penerapan Bagi Hasil Menabung di Bank Muamalat KC Madiun, Sedangkan Penelitian ini Tentang Praktik Bagi Hasil *Ambulance*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu bahwa penyusunan berusaha mengumoukan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun pengumpulan data dilakukan pada pelaku praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.¹⁴ Deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang rinci dan sistematik pada praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola. Analitik adalah cara

¹³ Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan Universitas PGRI Madiun (2014), *Penerapan Bagi Hasil Menabung di Bank Muamalat KC Madiun*, Vol.5. No.2

¹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengertian Ilmiah:Dasar, Metodedan Teknik*, Ed.Ke-7(Bandung:Tarsito, 1994), 1139.

melakukan analisa terhadap praktik yang terjadi tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Sedangkan data yang dicari yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pengelola praktik bagi hasil *ambulance* yang memberikan langsung pada peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai *literature* atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian disaring ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Populasi berasal dari bahasa inggris yang berarti *population*, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dalam karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Penengahan

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta;Rineka Cipta, 1993), 15

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 15

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang melakukan praktik bagi hasil *ambulance* berjumlah 1 orang pemilik modal *ambulance* dan 3 orang pengelola *ambulance*, jadi total populasi berjumlah 4 orang, oleh karena itu jumlah populasinya 4 orang, maka penelitian ini termasuk penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode berikut:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁷ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pelaku praktik bagi hasil *ambulance*, baik dari pihak pengelola serta beberapa tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul atau terkumpul itu tidak logis atau dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan

¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 178

¹⁸*Ibid*, 115.

lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁹

b. Sistematis Data (*systemating*)

Sistematis data adalah menerapkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Penyusunan menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu teori tentang *mudharabah*.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) Sejarah Berdirinya usaha mobil *Ambulance*, (2) Keadaan Geografis Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung (3) Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum

¹⁹*Ibid.*, 122

²⁰ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 15

Islam di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

BAB IV berisi Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan Pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

BAB V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.






BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²¹

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fiqh* mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.²²



Menurut para *fuqaha* seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.²⁴

²¹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 123

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 136

²⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),

Akad *Mudharabah* merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. *Mudharabah* berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yang memiliki arti berpergian dalam urusan dagang. *Qirad* sendiri memiliki arti potongan yang mengambil dari kata *Al Qardhu*. Dimana sebuah transaksi memang melakukan pemotongan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan akad *mudharabah*.²⁵

Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerjasama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri.²⁶

Akad *Mudharabah* memang biasa disebut sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Dari pengertian dan sikap awalnya saja, akad ini membutuhkan rasa percaya antara pihak yang terlibat. Dalam istilah ekonomi, *mudharabah* biasa disebut *trust financing* yang memang bermodalkan kepercayaan untuk membangun sebuah transaksinya. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 66

²⁶ *Ibid*

modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha atau dagang). Landasan Syariah dari *al-mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha.²⁷

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *Mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:²⁸

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep

²⁷MuhammadSafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 95

²⁸Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 196-197

Mudharabah juga dapat dilakukan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.²⁹

Dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* (memukul atau berjalan) yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.³⁰ Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*. Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:³¹

- a. Menurut para *fuqaha*. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai *mudharabah* mutlak bahwasanya Pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada Pengusaha lain atas izin pemilik modal, namun harta tetap dalam tanggung jawab pengusaha yang pertama.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- d. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

²⁹M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 195

³⁰Muhammad, M.Ag., *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002), 69

³¹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95

- e. Menurut Muhammad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *Mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil.

Dari beberapa pengertian *Mudharabah* yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik pengertian bahwa akad *Mudharabah* adalah bentuk kontrak kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad *Mudharabah* yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.³²

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari Hukum Islam, maka *Mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma'.³³

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *Mudharabah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْئَعَهُمْ
فِيْءَآدَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ
(البقرة: ١٩)

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 82-83.

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2010), 204

memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”(QS Al-Baqarah ayat 19)

b. Al-Quran Surah Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

”Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”(QS Al-Jumuah ayat 10)

Kedua ayat tersebut mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

c. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الَّذِينَ وَالْيَهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَلَبَّثَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا نُنَزِّلُ مِنَ الْفُرْقَانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَصْتَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا نُنَزِّلُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ رَجِيئُ

(المزمل: ٢٠)

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di

muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Muzammil ayat 20)

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

d. Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS An-Nissa ayat 29)

Mudharabah tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.

a. Hadis Pertama

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)³⁴

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR ath Thabrani Nomor 2343). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.³⁵

b. Hadis kedua

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ تَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرَ ثَمَرِهَا (رواه مسلم)³⁶

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)³⁷

³⁴ Erwandi Tarmizi, *Bab Qiradh / Mudharabah – Bagian ke-1 – Kitab Matan Abu Syuja'*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2016), 2343

³⁵ *Ibid*

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Bab Qiradh / Mudharabah – Bagian ke-1 – Kitab Matan Abu Syuja'*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2016), 4048

³⁷ *Ibid*

Selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum *Mudharabah*, maka ijma' ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *Mudharabah*. Seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi'i Antonio, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.³⁸

B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada 3, yaitu; 2 orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu; modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang akad.³⁹

Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam *Mudharabah*, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*, yaitu:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Faktor ini kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa 2 pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada.
- b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja) Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 96

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

- c. Persetujuan 2 belah pihak (*ijab* dan *qabul*) Faktor ini yaitu persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsipan - *taraddinminkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. Nisbah keuntungan Faktor ini adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima dari kedua belah pihak yang ber-*Mudharabah*. *Mudharib* mendapat imbal atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.⁴⁰ Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *aqidain*.⁴¹

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Mudharabah* adalah:

⁴⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 205-206

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, 479

- a. Dua pihak yang berakad pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola dana/pengusaha (*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diadakan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
- c. Sighat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*)
- d. Harta atau Modal
 - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- e. Keuntungan
 - 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
 - 2) Kesepakatan rasio *persentase* harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-maal*⁴².

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), 139

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

Rukun dan syarat *mudharabah* lainnya ialah :

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:⁴³
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi*, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

⁴³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kompas Gramedia Building, 2010) 173

- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:⁴⁴
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi pemilik mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu

⁴⁴*Ibid.*, 174

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam Akad *Mudharabah*, sebagai syarat sahnya akad Menurut Kompilasi Hukum

Rukun *mudharabah* adalah :⁴⁵

- a. *Shahibul maal* (pemilik modal) ;
- b. *Mudharib* (pelaku usaha); dan
- c. Akad.

Sedangkan menurut Gemala Dewi, rukun dari *Mudharabah* adalah adanya *Ijab Kabul* dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.

Syarat dari *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan.
- d. Bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Lebih lanjut Gemala Dewi, menyatakan syarat-syarat dalam pembuatan akad *mudharabah* adalah :⁴⁷

- a. Modal berbentuk uang tunai.
- b. Modal itu harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai

⁴⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 89

⁴⁶*Ibid.*, 92

⁴⁷Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Study Komparasi*, cetakan pertama, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011), 10

dengan kesepakatan. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$). *Mudharabah* itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratannya pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri, barang atau pada waktu tertentu. Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad sah pula dengan *maqayyad* (terikat).

Selain rukun dan syarat, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :⁴⁸

- a. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dapat bersifat bebas (*muthlaqah*) dan terbatas (*muqayyadah*) pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.
- b. Pihak pelaku usaha dalam *mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.
- c. Modal harus berupa uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang pasti.
- d. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.
- e. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan diatas adalah batal.

Menurut Hirsanuddin, rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Penyedia dana dan pelaku usaha (*shahibul maal dan mudharib*) harus cakap bertindak dalam hukum.
- b. Pernyataan *Ijab dan Kabul* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan dari akad.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹ Siti Hamidah, *Akad Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah*, Jurnal Hukum dan Syariah (Vol. 7 No.2 Tahun 2016), 9

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
- 1) Modal diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal berbentuk uang atau barang.
 - 3) Modal tidak boleh berbentuk piutang.
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah sejumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan dalam bentuk *presentase* atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan atas kesepakatan.
 - 3) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian kecuali apabila *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib* tanpa campur tangan penyedia jasa, tetapi *shohibul maal* berhak melakukan pengawasan.
 - 2) *Shohibul maal* tidak boleh mempersempit tindakan *mudharib* yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan dalam kegiatan *mudharabah*.

- 3) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh bertentangan dengan syariah.⁵⁰

Suatu akad berakhir apabila : sudah tercapai tujuannya, apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Berakhirnya Akad *Mudharabah*, dapat terjadi karena :⁵¹

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan melakukan tugas yang berhak mendapatkan upahnya.
- b. Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini *mudharabah* menjadi batal dan pemilik modal berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal).

Sifat utama *Mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko :

- a. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.

Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari *Mudharabah* dilakukan oleh

⁵⁰Rachmat syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 223

⁵¹*Ibid*

dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain:

- a. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
- b. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang akad *mudharabah*, kegiatan usaha yang dapat melaksanakan kerja sama *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan pengelola (*'amil/mudharib*) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelola (*'amil/mudharib*) dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. Pengelola (*'amil/mudharib*) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha (*ra's al-mal*) dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari pemilik modal (*shahibul maal*).
5. Pengelola (*'amil/mudharib*) tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*at-ta'addi*), tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*at-taqshir*), atau menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad (*mukhalafat asy-syuruth*).

C. Jenis – jenis dan Konsep *Mudharabah*

Mudharabah hanya memiliki dua jenis yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan jenis-jenis *Mudharabah*, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁵² Dalam *Mudharabah* ini, pemilik modal (*shahibul maal*) tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* Pemilik dana memberikan batasan –batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.⁵³ Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul maal* turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*. Segala yang dilakukan oleh *mudharib* dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus diketahui oleh *shahibul maal*.
- c. *Mudharabah Musytarakah* merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa anda ketahui. Ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad *mudharabah* dengan modal (100%) dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad

⁵² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 79

⁵³ *Ibid*

mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemoda.⁵⁴ *Mudharib* (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam *fiqh* berkaitan sistem *mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Modal Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*Ra'sul Maal*” ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah *memudharabah*-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
 - 2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
 - 3) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b. Manajemen Kontrak *mudharabah* dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:

⁵⁴ Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal IuS, (Vol III Nomor 4 April 2014), 42

⁵⁵ *Ibid*

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha. Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para *fuqaha* sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.

c. Jaminan Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang memberikan modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikurangi. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi nyata. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas

terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

- d. Jangka waktu Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.
- e. Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antara *din minkum* (saling ridho).
- f. Bentuk *Mudharabah* Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai *deficit unit* (pengurangan pendapatan). Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan

langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (*amanah*)

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akad di dapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syariah tentang bagi hasil mengikuti landasan syariah *mudharabah*. Adapun konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dengan sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama, nominal, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

D. Hikmah dan Berakhirnya *Mudharabah*

Islam membolehkan bagi hasil karena memberikan kemudahan pada manusia. *Mudharabah* mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu memupuk setiap orang untuk memiliki sifat tolong menolong dan jiwa gotong royong sesama manusia. Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan. Sebelum membahas tentang hikmah

⁵⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 265

mudharabah terlebih dahulu memaparkan manfaat *mudharabah* bagi *shahibul mal* dan bagi *mudharib*, yaitu:⁵⁷

a. Bagi *Shahibul Maal*

Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁵⁸

b. Bagi *Mudharib*

- 1) Tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar.
- 2) Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan.
- 3) Mendapatkan pekerjaan atau penghasilan.

Adapun hikmah *mudharabah* adalah sebagai berikut

:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah (5): 2)

⁵⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 202

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87.

- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dan pengelola modal.
- c. Memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pemilik modal maupun pengelola modal.
- d. Terciptanya lapangan pekerja baru, sehingga dapat membantu mengurangi sedikit angka pengangguran.

Hikmah *mudharabah* menurut *syara'* adalah untuk menghilangkan kefakiran atau kesulitan sesama manusia, serta untuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dalam praktik seperti ini, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal, yaitu:⁵⁹

- a. Pahala yang besar dari Allah *swt* dimana dia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungan yaitu tukar-menukar manfaat diantara keduanya
- b. Berkembangnya modal awal dan bertambahnya kekayaan. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian dia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faidah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi kaya padahal sebelumnya fakir. Semua adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT

Hikmah lain diperbolehkannya kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa tolong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga

⁵⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjamah Faisal Saleh dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, 482.

kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.⁶⁰

Islam mensyariatkan akad kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib al mal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah *ta'ala* tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang mendasar selain konsep *ta'awuniah* dan *amanah* yang dalam pelaksanaan usaha ini hendaknya juga harus diterapkan, agar usaha ini sesuai dengan prinsip islam dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama. Adapun lima prinsip tersebut adalah :⁶¹

- a. Dalam melakukan usaha, modal yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang haram.
- b. Dalam melakukan usaha tersebut diusahakan untuk usaha yang banyak manfaatnya bukan untuk usaha yang banyak *mudharat*-nya.
- c. Usaha yang dijalankan itu tidak menzalimi salah satu pihak yang bekerjasama.
- d. Usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur *riba*.
- e. Usaha dalam kerjasama itu tidak mengandung kesamaran atau *gharar*.

⁶⁰*Ibid*

⁶¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah Faisal Saleh dkk:penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. 1, 482

Dengan demikian sistem *mudharabah* ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Hak Pekerja.

Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.

- 1) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- 2) Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- 3) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- 4) Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak Pemilik Modal

Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

c. Kontrak Berakhir

Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru. Apabila sistem *mudharabah* ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering mencuat (muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan *syari'ah islamiyah* berangsur-angsur dapat diwujudkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai *mudharabah* ini adalah hal-hal yang menyebabkan batalnya *mudharabah* serta masa berakhirnya *mudharabah* tersebut. *Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut.⁶²

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapat sebagian keuntungannya sebagai upah. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Keadaan seperti ini maka pengelola modal bertanggung jawab apabila terjadi kerugian karena ialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

Akad *mudharabah* juga dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.⁶³

- a. Meninggalnya salah satu pihak, baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola atau pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad *wakalah* yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak baik pihak yang mewakilkan atau pihak yang diwakilkan, dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad *wakalah* maka batal juga dalam akad *mudharabah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah,

⁶²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 201.

⁶³Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, (Volume 8, Nomor 1, Januari 2010), 77

Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

- b. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilangnya akal karena gila dan pingsan.
- c. Kedua belah pihak atau salah satunya mengundurkan diri.
- d. Musnah atau hilangnya modal secara keseluruhan di tangan pihak pengelola modal sebelum dibelanjakan, sehingga tidak mungkin bisa melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena dicuri orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan.
- e. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak pengelola atau pekerja.
- f. Pihak pemilik modal *murtad* (keluar dari agama islam), karena *murtad* dapat menghilangkan keahlian kepemilikan modal dan harta orang *murtad* dibagikan kepada para ahli warisnya. Akan tetapi jika kembali lagi kepada Islam, maka akad tersebut bisa diteruskan lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Menurut Wahbah al-Zuhayli ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *mudharabah*, yaitu.⁶⁴

- a. Pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan

Pembatalan *mudharabah* karena pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan yang diketahui oleh pemiliknya serta apabila *ra's al-mal* yang berupa uang atau mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Namun apabila *'amil* tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan maka *'amil* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

⁶⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 61.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Menurut jumhur ulama, apabila *rab al-mal* atau '*amil* meninggal dunia, maka dengan sendirinya *mudharabah* menjadi batal.

c. Salah seorang yang berakad gila

Mudharabah itu menjadi batal apabila salah satu pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini disebabkan karena secara hukum, gila dapat menghilangkan kecakapan hukum.

d. *Rab al-mal* murtad dari Islam

Menurut Hanafiyah apabila *rab al-mal* murtad dari Islam dan meninggal atau terbunuh dalam keadaan *murtad* atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan hakim tentang pembelotannya maka dapat membatalkan *mudharabah*. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan kecakapan hukum *rab al-mal*.

e. Modal rusak di tangan '*amil*

Apabila modal rusak di tangan '*amil* sebelum membelikan sesuatu maka *mudharabah* itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad *mudharabah* dengan penerimaan. Batalnya akad karena rusaknya modal seperti halnya dalam *wadi'ah*.

E. Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁵

F. Pengaturan Prinsip *Mudharabah* Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut pendekatan etimologi bahasa Arab kata *mudharabah* pada kamus Lisan *al-Arab* datang dalam timbangan *mufa'-alah*, diambil (*musytaq*) dari kata kerja *dharaba* yang memiliki beberapa makna di antaranya, berjalan di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerja usaha.⁶⁶ Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, kata *mudharabah* maknanya sama dengan *qiradh*. Al-Mawardi menyebutkan bahwa kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata *qiradh* lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan *mudharabah* merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani juga menyebutkan bahwa penduduk Hijaz menamakannya *qiradh* dan penduduk Irak menyebutnya *mudharabah*. Al-Juaini mengemukakan bahwa kata *qiradh* tersebar di negeri Hijaz sebagaimana tersebar kata *mudharabah* di negeri Irak. Husain Muhammad al-Maghra menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata *al-muqar-adhah* adalah *al-qiradh*, dan *qiradh* adalah kerjasama dengan pelaku usaha (*al-amil*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, dan dinamakan *mudharabah* karena diambil dari maknanya berjalan dimuka bumi untuk mendapatkan keuntungan yang biasanya dengan musafir. Adapun pengertian terminologi *mudharabah* menurut Frista Artmanda Widodo adalah : Jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan

⁶⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 176

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet. 4, 119-120.

pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah. Sedangkan makna terminologis *mudharabah* dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri adalah :⁶⁷

- 1) Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara *mudharabah*. Maka tujuan pokok dari *mudharabah* pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*shahib al-mal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha. Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah, bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (*arad tijarah*) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad *mudharabah* rusak atau batal.
- 3) Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah atau resmi berlaku.
- 4) Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (*shahibul maal*) kepada yang

⁶⁷ *Ibid*

lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut penjelasan mazhab ini, bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian *mudharabah* pada akad (*al-aqd*), pemilik modal (*malik al-mal*), pelaku usaha (*al-amil*), serta penetapan cara pembagian keuntungan (*al-ribh*) yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak menyebutkan kata *sighat* karena dipandang *include* (termasuk) pada akad dengan asumsi bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan *sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Fokus-fokus pada pengertian di atas nantinya akan melahirkan rukun *mudharabah*. Melalui uraian empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian *mudharabah* tersebut memang terdapat perbedaan persepsi antar para *fuqaha* seputar definisi *mudharabah*, terdapat titik temu pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagian-bagian lainnya. Sebagian *fuqaha* menentukan syarat-syarat khusus yang tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya. Oleh karenanya, ada tiga titik temu para *fuqaha* antar empat mazhab yang prinsipil seputar persyaratan *mudharabah* yaitu:⁶⁸

- a) Bahwa pada akad *mudharabah* terdapat para pihak.
- b) Bahwa para pihak pada akad *mudharabah* adalah salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (*al-amil*).
- c) Bahwa tujuan *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan

⁶⁸ *Ibid.*, 99

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (Vol II Nomor 2), 13

pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.

2. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.
3. Prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak *mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.
4. Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.
5. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010)
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Ali, L, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosa Karya, 2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010)
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Study Komparasi*, cetakan pertama, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011)
- Karya, C. W, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Semarang: Balai Pustaka, 2005)
- Kantor Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
- Kantor Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, A, *Metode Penelitian Hukum Dan Carga Pendekata Masalah* (Fakultas Hukum UNILA, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Jakarta, 2003)
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Surakhmad, W, *Pengantar Pengertian Ilmiah: Dasar, Metododan Teknik, Ed. Ke-7*. (Bandung: Tarsito, 1994)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Syafei R, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Sitia, 2004)
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk:penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu, Jilid. 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ali, L, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosa Karya, 2019

Karya, C. W. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Balai Pustaka.

Muhammad, A. (2002). *Metode Penelitian Hukum Dan Carqa Pendekata Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum UNILA.

Sugiono. (3003). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Jakarta.

Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Pengertian Ilmiah: Dasar, Metodedan Teknik, Ed. Ke-7*. Bandung: Tarsito.

Susiadi. (2014). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Sitia.

Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Jurnal

Bambang Waluyo, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (Vol II Nomor 2)

Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal IuS, (Vol III Nomor 4 April 2014)

Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, (Volume 8, Nomor 1, Januari 2010)

Siti Hamidah, *Akad Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah*, Jurnal Hukum dan Syariah (Vol. 7 No.2 Tahun 2016)

Skripsi :

Ikha Tasfira, (2007) *"Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam"* ,Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maya yusenta, (2019) *"Tinjauan hukum islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang, tulang bawang"*, skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan lampung

Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan Universitas PGRI Madiun (2014), *Penerapan Bagi Hasil Menabung di Bank Muamalat KC Madiun*, Vol.5. No.2

Ratih Afrilia Dewi, (2017) *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengarap Kebun Pada Petani Kopi, Lampung Utara,"*Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Online :

Pengertian, Karakteristik, Jenis Dan Syarat Bagi Hasil"(On-Line), Tersedia di: <https://www.kajianpustaka.com> (12 desember 2020)

Arti Kata Praktek Kamus Besar Bahasa Indonesia"(On-Line), Tersedia Di: <https://kbbi.web.id/praktik.html> (12 desember 2020)

Wawancara :

Agung Setyo (Pemilik Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 23 Mei 2021.

Arief (Pengelola Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 26 Mei 2021

Rudi (Pengelola Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 25 Mei 2021

Yusuf (Pengelola Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 25 Mei 2021 Arief (Pengelola Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 26 Mei 2021

Budi, Alex, Siska Wulandari (Istri dan Paman Pemilik Mobil *Ambulance*), wawancara dengan penulis, Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 25 Mei 2021

